

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah	: SMPN 43 BATAM
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester	: VIII / 1 (Ganjil)
Materi Pokok	: Memaknai Peraturan Perundang-undangan
<i>Sub. Materi</i>	: Makna Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia
Alokasi Waktu	: 3 x 40 menit (1 kali pertemuan)

A. Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator
1.3 Menanggapi tata urutan peraturan perundang-undangan dalam system hukum nasional di Indonesia secara adil.	1.3.1 Berpikir positif dalam memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa.
2.3 Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional.	2.3.1 Berperilaku disiplin di masyarakat dengan melaksanakan konsepsi tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar

	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>2.3.2 Berperilaku tanggung jawab di masyarakat dengan melaksanakan konsepsi tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>
<p>3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.</p>	<p>3.3.1 Menguraikan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.</p> <p>3.3.2 Menjelaskan Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3.3.3 Memberikan contoh sikap sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p>4.3 Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional nasional di Indonesia.</p>	<p>4.3.1 Mendemonstarsikan hasil analisis pola pengembangan Tata Urutan Peraturan perundang – undangan dalam sistem hukum nasional.</p>

C. Tujuan Pembelajaran

1. Melalui pembelajaran dengan diskusi bersama guru peserta didik mampu menunjukkan sikap religius, disiplin, jujur, dan kerja sama
2. Melalui Pengamatan tayangan PPT bersama guru, peserta didik dapat Menganalisis Urgensi makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dengan benar
3. Melalui Pengamatan tayangan PPT bersama guru, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia secara sistematis
4. Melalui Pengamatan tayangan PPT bersama guru, peserta didik dapat menganalisis Lembaga yang berwenang menguji ketidaksesuaian peraturan dengan aturan yang lebih tinggi dalam hierarki Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dengan benar
5. Melalui presentasi kelompok, peserta didik dapat mendemonstarsikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional secara sitematis

D. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

1. Religius
2. Kedisiplinan
3. Kejujuran
4. Kerjasama

E. Materi pembelajaran (*Terlampir*)

1. Materi reguler

Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Wujud dari norma hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah. Pengertian dari peraturan perundang-undangan adalah seluruh peraturan yang berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden (Perpres)
- f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
- g. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten (Perda Kota/Kabupaten)

2. Materi Remedial

Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi buku teks PPKn Kelas VIII Bab 3. Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya.

3. Materi Pengayaan

Peserta didik diberikan bahan bacaan yang relevan dengan materi seperti persoalan-persoalan **Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

F. Metode Pembelajaran

- Pendekatan : *Scientific*
Metode : Diskusi, tanya jawab, ceramah
Model Pembelajaran : PBL dengan kajian Konstitusional

G. Media, Alat/ Bahan Pembelajaran

Media :

1. Bahan tayang berbasis *Microsoft Power Point*
2. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
3. Modul Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
4. Buku UUD 1945

Alat dan Bahan :

1. Spidol, kertas, papan tulis
2. LCD/ projector, komputer/ laptop

H. Sumber Belajar

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017. *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VIII*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VIII*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- c. Wikipedia berbahasa Indonesia dan beberapa literatur Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
- d. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran 2. <u>Guru memeriksa kehadiran peserta didik</u> 3. Peserta didik menyanyikan lagu “INDONESIA RAYA” dan mendengarkan penjelasan guru tentang pentingnya menanamkan rasa nasionalisme 4. Untuk memotivasi belajar, peserta didik dirangsang dengan video inspirasi hari ini. Kemudian guru bertanya kepada peserta didik “Inspirasi apa yang kalian amati pada video tersebut?”. Video dapat diakses pada link berikut https://drive.google.com/file/d/1TI2GyiDnijgOWJN0wOp0gfvYg-B3hTvD/view?usp=sharing 5. Mengaitkan pembelajaran sebelumnya yaitu materi Melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945 dengan materi yang akan dibahas, yaitu Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 6. Menyampaikan tujuan pembelajaran, memberi motivasi tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan & manfaat) dengan mempelajari materi Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Salah satunya mengutarakan dengan mengetahui dan terampil dalam menganalisis keterkaitan Tata urutan peraturan perundang-undangan. 7. Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, yaitu Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Menjelaskan kompetensi yang akan dicapai, yaitu menganalisis Keterkaitan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, serta menelaah lembaga yang berwenang untuk mengevaluasi suatu peraturan perundang-undangan. 	
Kegiatan Inti (90 Menit)	
<p>Orientasi peserta didik terhadap masalah</p>	<p>Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada materi Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melihat Menayangkan gambar/foto/video yang relevan • Mengamati Pemberian contoh-contoh materi Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dari media interaktif, dsb. • Membaca Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi dari buku paket, modul, dan atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. • Mendengar dan Menyimak <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemberian materi Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia oleh guru melalui tayangan PPT.

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan brainstorming dimana peserta didik dihadapkan pada Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia oleh guru.
Mengorganisasikan peserta didik	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen • Membantu peserta didik membaca masalah, misal : <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa pengertian dari peraturan perundang-undangan? 2. Apa yang dibuat dalam peraturan tersebut? 3. Untuk apakah peraturan itu dibuat? 4. Bagaimana prinsip Peraturan perundang-undangan tersebut? 5. Apa saja muatan-muatan yang terkandung dalam peraturan tersebut? 6. Bagaimana tata urutan atau hierarki peraturan undang-undangan? 7. Bagaimana keterkaitan dari setiap hierarki peraturan tersebut? 8. Jika ada ketidaksesuaian aturan terhadap masyarakat atau pihak tertentu apa yang harus dilakukan dan bagaimana prosedurnya? • Memimbing Peserta didik mendiskusikan hal-hal yang harus dikerjakan dan konsep-konsep yang harus didiskusikan dan pertanyaan pertanyaan yang harus dijawab untuk memecahkan masalah • Peserta didik mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan guru
Membimbing penyelidikan individu dan kelompok	Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan membagikan ide mereka sendiri untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Kelompok mempresentasi hasil analisis terhadap Tata urutan Peraturan Perundang-undangan, kemudian peserta didik lain memberi argumen terhadap jawaban pemecahan masalah.
Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Siswa dibimbing guru melakukan analisis terhadap pemecahan masalah yang telah ditemukan ➤ Guru dan peserta didik menganalisis dan mengevaluasi terhadap pemecahan masalah yang dipresentasikan setiap kelompok.
Kegiatan Penutup (15 Menit)	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meninjau kembali Guru membimbing peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya jawab secara klasikal. ➤ Mengevaluasi Guru melakukan refleksi dengan peserta didik atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan berkaitan dengan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, dengan meminta peserta didik menjawab pertanyaan berikut: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Indonesia bagi kalian? ➤ Apa sikap yang kalian peroleh dari proses pembelajaran yang telah dilakukan? 	

- Apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan?
- Apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan?
- Apa sikap yang perlu dilakukan selanjutnya?
- Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya tentang Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
- Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam.

J. Penilaian Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan

1. Teknik Penilaian

a. Sikap

Penilaian Observasi

b. Pengetahuan

Tes tertulis dalam LKPD

c. Keterampilan

Penilaian Unjuk Kerja

2. Instrumen Penilaian (*terlampir*)

3. Remedial

Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai KKM mata pelajaran PPKn. Untuk mencapai kompetensi yang diinginkan maka diberikan tugas di luar jam pelajaran.

4. Pengayaan

Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang sudah mencapai kompetensi yang diinginkan sesuai KKM mata pelajaran PPKn.

Batam, 2 Oktober 2021

Mengetahui

Kepala Sekolah

Sahir, S.Pd

NIP.19661207 199103 1 004

Guru Bidang Studi

Sudarmono, S. Pd

NIP.